Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 1 (2018) 28-37

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

RESONA
Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat

http://journal.stiem.ac.id/index.php/resona/index

Pemberdayaan Manajemen Usaha Kelompok Pembudidaya Tambak di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Andi Dahri Adi Patra Ls[1], I Ketut Patra[2]

[1,2]*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo*

INFO NASKAH

Diserahkan
8 Agustus 2018
Diterima
8 Agustus 2018
Diterima dan disetujui
8 Agustus 2018

Kata Kunci:
Desa manurung
Kelompok Pembudidaya
Manajemen usaha
Pemberdayaan
Tambak

ABSTRAK

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari empat Kabupaten di Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai sentra produksi dengan luas lahan pada tahun 2015 seluas 10.249 hektare, jumlah produksi 10.199-ton dengan tingkat produktivitas rata-rata 991 kg/ha. Kendala yang dihadapi kelompok pembudidaya tambak untuk melaksanakan pola intensifikasi adalah terbatasnya modal untuk pembiayaan produksi serta masih lemahnya kemampuan dalam manajemen usaha kelompok. Melalui program KKN-PPM, STIE Muhammadiyah Palopo mencoba memberikan solusi alternatif pemberdayaan manajemen usaha dalam bentuk simulasi dan bimbingan teknis manajemen usaha dengan materi penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Rencana Kebutuhan Investasi dan analisis kelayakan usaha. Kelompok pembudidaya memperoleh gambaran dari simulasi bimbingan teknis bahwa untuk pengelolaan tambak secara intensif dibutuhkan investasi kebutuhan modal kerja untuk 2 (dua) kali siklus panen Rp44.610.000 dan hasil bersih atau laba sebelum pajak untuk 2 (dua) kali siklus panen sebesar Rp36.070.000 per hektare. Kegiatan intensifikasi tambak sangat layak untuk menjadi program strategis dalam upaya meningkatkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya tambak di Desa Manurung pada khususnya dan Kabupaten Luwu Timur pada umumnya.

1. Pendahuluan

Salah satu Agenda Nasional Pemerintah (NAWACITA) dalam RPJM tahun 2015-2019 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan) serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Tentunya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di berbagai daerah akan memberi perhatian dan di *break down* dalam RPJMD sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah. Sasaran kebijakan pengembangan usaha budidaya perikanan

Corresponding Author:
andidahri8595@gmail.com; *+62 813 4299 5212*

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya memperkuat kemandirian kelompok dan kelembagaan dengan kegiatan utama: (a) penguatan kelompok pembudidaya dan pembenih ikan; (b) penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan skala besar; dan (c) peningkatan kemitraan usaha.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari empat kabupaten di Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai sentra produksi dengan luas lahan pada tahun 2015 seluas 10.249 hektare, jumlah produksi sebesar 10.199 ton dengan tingkat produktivitas rata-rata 991 kg per hektar. Kondisi ini memberi gambaran bahwa pola pengelolaan tambak di Desa Manurung pada umumnya masih pola tradisional dengan tingkat produktifitas rendah, sebagaimana *prosiding* Nur Ansari Rangka dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, tentang Teknologi Budidaya ikan bandeng di Sulawesi Selatan (*Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur* 2010), mengemukakan pola teknologi budidaya ikan bandeng antara tradisional dan intensif dengan kriteria kepadatan penebaran yakni paling rendah 5000 ekor bibit pola (tradisional) sampai paling tinggi 50.000 ekor bibit (pola intensif).

Komoditas ikan bandeng di Kabupaten Luwu Timur dikembangkan pada 4 (empat) wilayah kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili. Tahun 2015 jumlah produksi budidaya tambak di Kabupaten Luwu Timur mencapai 10.199-ton dan pada tahun 2010 hasil produksi sebesar 4.985 ton. Ini berarti bahwa produksi ikan bandeng di Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan sebesar 5.214-ton atau 105% yaitu dari 4.945-ton tahun 2010 menjadi 10.199-ton pada tahun 2015, demikian pula luas lahan produksi mengalami peningkatan sebesar 4.508 ha atau 78,9%. Tingkat produktivitasnya masih sangat rendah, hanya mencapai 991 kg per hektar.

Nur Ansari Rangka dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, tentang Teknologi Budidaya ikan bandeng di Sulawesi Selatan (*Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur* 2010), mengemukakan pola pengelolaan tambak teknologi budi daya ikan bandeng antara tradisional dan intensif dengan kriteria kepadatan penebaran ha/ekor yakni paling rendah 5000 ekor bibit pola (tradisonal) sampai paling tinggi 50.000 ekor bibit (pola intensif). Jika diasumsikan kematian bibit 20% dan berat 4-5 ekor per kg, maka produktivitas ikan bandeng per hektare adalah 1000 kg/ha (tradisional), 2000 kg/ha (semi intensif) dan 4000 kg/ha (intensif). Kenaikan produksi budidaya tambak ikan bandeng di Kabupaten Luwu Timur sebesar 105% pada tahun 2015 atau dua kali lipat dari jumlah produksi tahun 2010 bukan merupakan upaya intensifikasi melainkan hasil upaya ekstensifkasi yakni menambah luas

lahan 78,9% untuk meningkatkan produksi, sehingga hasil rata-rata hanya mencapai 991 kg/ha (1 ton) masih pola tradisional, walaupan pada kondisi di lapangan sudah ada pembudidaya yang mencapai hasil 2-3 ton per hektare (pola semi intensif).

Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan serta peluang bagi kelompok pembudidaya untuk mewujudkan secara ril posisi Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu sentra produksi ikan bandeng di Sulawesi Selatan. Rendahnya produktivitas rata-rata per hektare bukan hanya merupakan faktor teknis tetapi juga faktor nonteknis (manajemen usaha), sebab masyarakat pada umumnya sudah mendapat bimbingan teknis secara langsung dari petugas penyuluh perikanan, pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta berbagai bantuan stimulan dari pemerintah baik yang bersumber dari APBN (DAU dan DAK) serta APBD.

Identifikasi masalah di lapangan diperoleh data bahwa rendahnya tingkat produktivitas petani tambak ikan di Desa Manurung adalah masalah nonteknis (manajemen usaha), petani cenderung tidak merasa bahwa produktivitasnya rendah karena hasil produksi dan penjualan yang diperoleh sudah meningkat 2 (dua) kali lipat dari jumlah tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan ini terjadi karena pembudidaya merasa lebih mudah untuk meningkatkan produksi dengan cara pintas melalui ekstensifikasi tambak yaitu dengan menambah luasan areal/lahan tambak.

Jika dianalisis dari aspek manajemen usaha, kegiatan intensifikasi tambak jauh lebih ekonomis dan menguntungkan karena produksi bisa mencapai 4 ton per hektare sebagaimana simulasi yang dilakukan pada kegiatan pemberdayaan manajemen usaha kelompok pembudidaya ikan bandeng di Desa Manurung Kecamatan Malili. Berusaha tani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Pemerintah perlu memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok agar petani tersebut akan lebih kuat baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya.

2. Masalah

Beberapa permasalahan kelompok usaha pembudidaya tambak ikan yang dapat diidentifikasi adalah lemahnya pengetahuan masyarakat pembudidaya dalam hal administrasi dan manajemen usaha serta lemahnya akses petani terhadap Bank Penyelenggara Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperoleh bantuan Modal Kerja. Problem mendasar bagi

mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani.

3. Metode Pelaksanaan

Metode pendampingan yang dilaksanakan untuk meningkatkan akses kelompok usaha pembudidaya terhadap perubahan harga dan sumber modal, menggunakan pendekatan model strategi pemberdayaan masyarakat. Menurut Sunyoto Usman (2004:40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling)* meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (*opportunies*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering).* Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunies*) seperti pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik. Ketiga, melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian ***(****charity*). Pelaksanaan program pembinaan (pelatihan dan pendampingan) terdiri dari beberapa tahapan dengan tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapannya adalah:

Persiapan dan Pembekalan

Persiapan dan pembekalan melibatkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STIE Muhammadiyah Palopo dan seluruh peserta dalam program KKN-PPM sebelum terjun ke lokasi KKN-PPM.

Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka perencanaan pelaksanaan program dilakukan dengan langkah sebagai berikut: (a) serah mahasiswa KKN-PPM ke pejabat daerah setempat (Camat Malili, beserta unsur muspida, Kepala Desa Manurung beserta staf) sebagai

tanda resmi KKN-PPM dimulai; (b) sosialisasi dilaksanakan oleh mahasiswa beserta aparat Kantor Desa Manurung setempat dibantu unsur pemuda/karang taruna; (c) rencana program kerja dan aktivitas mahasiswa dibagi sedemikian rupa sesuai tupoksi dan peran dalam pendampingan dan pemberdayaan manajemen usaha kelompok pembudidaya; (d) langkah-langkah dilaksanakan dengan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah daerah dari berbagai narasumber antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan serta dari pihak perbankan untuk mensosialisasikan sistem, prosedur, dan kelengkapan dokumen dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (e) metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok mitra pengabdi (Kelompok Usaha Pembudidaya) adalah teknik pemberdayaan kelompok disertai praktik manajemen usaha yang dilakukan oleh mahasiswa bersama-sama dengan kelompok masyarakat.

Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan evaluasi dan *monitoring* dilakukan secara menyeluruh sejak pembekalan mahasiswa hingga berakhirnya kegiatan. Sebelum dilakukan sosialisasi pemberdayaan manajemen usaha kelompok pembudidaya, dilakukan penelusuran dan survei informasi mengenai kebutuhan mahasiswa KKN-PPM terkait pengetahuan dalam bidang manajemen usaha budidaya tambak ikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan kelompok pembudidaya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh potensi dan aspek pembinaan yang memungkinkan bersinergi dalam program pengabdian KKN-PPM STIE Muhammadiyah Palopo pada lokasi dan mitra kelompok pembudidaya tambak ikan bandeng di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan melibatkan pengabdi dan dinas terkait yang menjadi mitra pengabdian melalui keterlibatan mahasiswa secara langsung sejumlah 12 orang berdampingan dengan penduduk melakukan kegiatan praktek pemberdayaan manajemen usaha. *Outcome* dari kegiatan ini adalah:

a. Meningkatnya keterampilan mahasiswa sebagai sasaran strategis dalam mempersiapkan tenaga teknik yang terampil di bidang manajemen usaha kelompok pembudidaya tambak.
b. Terbangunnya jaringan koordinasi antara pemerintah desa, dinas teknis, pihak perbankan, dan STIE Muhammadiyah Palopo untuk memberdayakan manajemen usaha kelompok pembudidaya tambak dalam mengimplementasikan pengabdian masyarakat sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku pada mata kuliah KKN-PPM dengan bobot 4 sks.

c. Terlihatnya pola pemberdayaan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pelaku usaha (pembudi daya) di Kabupaten Luwu Timur melalui pendampingan manajemen usaha dan penguatan akses modal memalui KUR.
d. Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang nyata dengan adanya keterlibatan dalam masyarakat secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan persoalan, dan menanggulangi permasalahan pembangunan secara pragmatis *interdisipliner*.

Pemberdayaan Manajemen Usaha dan Koordinasi Kegiatan

Sosialisasi kegiatan KKN-PPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo dilakukan pada seminar program kegiatan KKN-PPM di Kantor Desa Manurung dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai narasumber, pihak perbankan, Camat Malili, Kepala Desa Manurung beserta staf, kelompok pembudidaya tambak, pengabdi dan mahasiswa KKN-PPM untuk membawa topik KKN-PPM pemberdayaan manajemen usaha. Ketua Tim Pengabdi Andi Dahri AP. LS, M.Si. menjelaskan tentang rancangan kerja pengabdian dan rancangan kemitraan kolaboratif antara perguruan tinggi dan masyarakat khusunya pembudidaya tambak ikan bandeng. Penjelasan juga mencakup bagaimana cara menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), cara memprediksi kebutuhan investasi, dan hasil intensifikasi atau estensifikasi usaha budidaya ikan bandeng termasuk analisis kelayakan usaha.

Sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut dari rencana dalam seminar program kerja melibatkan seluruh *stakehoders* dalam kegiatan KKN-PPM, kelompok pembudidaya tambak ikan 14 orang, mahasiswa 12 orang, tim pengusul pengabdian 1 orang, Kepala Desa Manurung, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur sekaligus sebagai pemateri tentang strategi dan kebijakan pembangunan perikanan khususnya budidaya ikan bandeng. Materi yang disosialisasikan mencakup tinjauan permasalahan, peluang, dan tantangan budidaya tambak, potensi dan posisi starategis Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu sentra pengembangan ikan bandeng di Sulawesi Selatan serta rencana kerja Dinas Kelautan Perikanan tahun 2018.

Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah mahasiswa mampu melakukan perencanaan usaha, teknis usaha, manajemen usaha serta manajemen pasca produksi untuk meningkatkan keterampilan di bidang kewirausahaan sebagai bekal intelektual muda ekonomi dan sekaligus bekal untuk terjun di masyarakat setelah menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo. Pemberdayaan manajemen usaha dilaksanakan dalam

bentuk sosialiasi dan simulasi menyusun RDKK serta membuat prediksi perkiraan biaya-biaya dan pendapatan sebagai dasar kebutuhan modal kerja.

Sosialisasi Pemberdayaan Manajemen Usaha

Lemahnya akses kelompok pembudidaya tambak untuk memperoleh bantuan modal melalui Kredit Usaha Rakyar (KUR) berpangkal minimnya pengetahuan dan pembudidaya terhadap manjemen usaha. Pihak kelompok pembudidaya tidak mampu meyakinkan secara administrasi kepada pihak bank pengelola KUR berapa jumlah definitif kebutuhan masing-masing anggota dalam satu kelompok baik untuk intensifikasi maupun untuk pengembangan (ekstensifikasi) termasuk tingkat kelayakan usaha. Selain itu, ada kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan jumlah kredit yang cukup besar melebihi jumlah kebutuhan modal dengan tujuan selebihnya untuk kepentingan lain yang sifatnya konsumtif. Kejadian seperti ini sangat berpotensi menjadi kredit yang bermasalah dan menjadi risiko buat perbankan, sehingga pihak bank penyelenggara KUR perlu lebih selektif.

Pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan menyampaikan bahwa telah dilaksanakan tahapan penyusunan rencana anggaran untuk tahun 2018, namun belum ada proposal yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, termasuk dari Desa Manurung. Hal ini mengindikasikan bahwa pembudidaya tambak belum mampu merespon dengan baik rencana kegiatan sebagaimana telah dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Maka dari itu, hal ini ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Manurung dengan memerintahkan kepada semua kelompok (14 kelompok pembudidaya tambak) yang mengikuti sosialisasi untuk segera membuat proposal usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dikordinir langsung oleh Kepala Desa dan bimbingan dari narasumber pemberdayaan manajemen usaha.

Simulasi Manajemen Usaha Budidaya Tambak

Pengelolaan tambak di Kabupaten Luwu Timur pada umumnya dan Desa Manurung Kecamatan Malili pada khususnya berada pada pola tradisional menuju pola intensifikasi atau lebih tepatnya semi intensifikasi. Hal ini terlihat bahwa tingkat produktivitas rata-rata saat ini hanya sekitar 1 ton per hektare atau *equivalent* dengan 5000 ekor bibit/nener dan pada kondisi di lapangan sudah ada yang mencapai 2 ton lebih per hektare.

Simulasi ini memberikan pengetahuan kepada peserta pemberdayaan manajemen usaha mengenai cara melakukan identifikasi biaya melalui perhitungan menggunakan pendekatan

asumsi data/perhitungan Nur Ansari Rangka dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, tentang teknologi budidaya ikan bandeng di Sulawesi Selatan (*Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur* 2010). Kemudian dikondisikan dengan keadaan pengelolaan tambak di Desa Manurung, Kecamatan Malili sebagai pertimbangan bahwa teknologi budidaya tambak di Sulawesi Selatan relatif sama. Demikian pula harga input (nener, pakan, dan pupuk) serta harga produksi ikan bandeng kisaran antara Rp10.000 sampai Rp12.500 per kg untuk berat 4-5 ekor per kg, dengan pola tradisional dan intensif. Pengelolaan tambak pola intensif terlihat pada spesifikasi bibit yang merupakan bibit terseleksi dari *hatchery*, menggunakan tambahan pakan buatan serta kepadatan penebaran mencapai 25.000 ekor per hektare dan tingkat produksi berada antara 3-4 ton per hektare serta sistem pengairan masih bergantung pada pasang surut air laut.

Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen usaha petani tambak di Kabupaten Luwu Timur masih pola semi insentif sehingga perlu mendapat pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha secara intensif dan terpadu dari pemerintah melalui lintas dinas teknis terkait serta dukungan bantuan permodalan dari pihak perbankan melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menuju pengelolaan tambak yang intensif dengan hasil produksi yang lebih maksimal.

5. Simpulan dan Saran

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Sebaiknya masyarakat terlibat dalam proses tersebut agar dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri, dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya. Pemerintah sebagai agen perubahan dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

Daftar Pustaka

DKP Kabupaten Luwu Timur, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Luwu Timur 2013 – 2018.*

Husnan, S dan Suwarsono. 2000. *Studi Kelayakan Proyek*. Unit Penerbit dan Pencetak AMP YPKN. Yogyakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 *Pedoman Pemgembangan Kemitraan Usaha Perikanan Budidaya*. Dirjen Perikanan Budidaya.

Masmulyadi, 2007. *Membangun Kesadaran dan Keberdayaan Petani***.** Diakses dari internet tangga 17 Maret 2017.

Rangka, N.A. dan A.I.J. Assad. 2010. Teknologi Budidaya Ikan Bandeng. *Prosiding Teknologi Akuakultur*: 187-203.

Sesbany. Penguatan Kelembagaan Petani untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani**.** Diakses dari internet 2016.

Soekartawi. 2005. *Agri Bisnis Teori dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sulistyaningsih. 2013. Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Kelompok pada Petani Rumput Laut di Desa Gelung Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbundo. *Jurnal Kemitraan UNARS*.

Syarfuddin, T. 2013. Petunjuk Teknis Produksi Udang Windu SPF. Balai Penelitian dan Pengenvangan Budi Daya Air Payau. Maros.

Umar, H. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Usman, S. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Wibisono, C.H. 1997. *Manajemen Modal Kerja*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Lampiran